

## Piagam Madinah dan Isu-Isu Utama Moderasi Beragama

Husnu Abdillah<sup>1</sup>, Arbi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
e-mail: [hasanhusnuabdillah@gmail.com](mailto:hasanhusnuabdillah@gmail.com)<sup>1</sup>, [arbiyasin@uin-suska.ac.id](mailto:arbiyasin@uin-suska.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Piagam Madinah merupakan dokumen penting yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW pada awal pembentukan negara Islam di Madinah. Piagam ini dianggap sebagai konstitusi pertama yang mengatur hubungan antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk umat Islam, Yahudi, dan suku-suku Arab lainnya. Piagam Madinah mengedepankan prinsip keadilan, persamaan hak, dan kewajiban antar warga, serta kebebasan beragama. Dengan menjamin hak-hak minoritas dan menetapkan perjanjian untuk menjaga kedamaian dan persatuan, Piagam Madinah menjadi model penting dalam moderasi beragama. Isu-isu utama moderasi beragama yang relevan dengan Piagam Madinah mencakup toleransi, perlindungan hak-hak minoritas, dan penghormatan terhadap pluralisme. Piagam ini mendorong dialog antar agama dan menetapkan aturan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Dalam konteks moderasi beragama saat ini, Piagam Madinah dapat dijadikan rujukan untuk mendorong inklusivitas, anti-radikalisme, dan sikap saling menghormati di tengah keberagaman. Tantangan modern dalam moderasi beragama, seperti ekstremisme, intoleransi, dan diskriminasi, menunjukkan perlunya mengkaji kembali nilai-nilai Piagam Madinah untuk menciptakan tatanan sosial yang damai dan harmonis.

**Kata kunci:** *Piagam Madinah, Isu-Isu Utama, Moderasi Beragama.*

### Abstract

The Medina Charter is an important document drawn up by the Prophet Muhammad SAW at the beginning of the formation of the Islamic state in Medina. This charter is considered the first constitution to regulate relations between various groups of society, including Muslims, Jews and other Arab tribes. The Medina Charter prioritizes the principles of justice, equal rights and obligations between citizens, as well as religious freedom. By guaranteeing the rights of minorities and establishing treaties to maintain peace and unity, the Medina Charter became an important model for religious moderation. The main issues of religious moderation relevant to the Medina Charter include tolerance, protection of minority rights, and respect for pluralism. This charter encourages interfaith dialogue and establishes rules for resolving conflicts peacefully. In the current context of religious moderation, the Medina Charter can be used as a reference to encourage inclusiveness, anti-radicalism and mutual respect amidst diversity. Modern challenges in religious moderation, such as extremism, intolerance and discrimination, demonstrate the need to review the values of the Medina Charter to create a peaceful and harmonious social order.

**Keywords :** *Medina Charter, Key Issues, Religious Moderation.*

### PENDAHULUAN

Piagam Madinah, atau Constitution of Medina, adalah dokumen penting yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah. Dokumen ini merupakan langkah awal dalam pembentukan masyarakat Islam yang adil dan inklusif. Sementara itu, moderasi beragama merupakan konsep penting dalam konteks global saat ini, mencerminkan sikap toleransi dan keseimbangan dalam praktik keagamaan. Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi Piagam Madinah serta isu-isu utama moderasi beragama dalam konteks modern.

Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya menjalani peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, sebuah langkah yang menandai awal pembentukan masyarakat Islam yang baru. Salah satu hasil utama dari hijrah ini adalah Piagam Madinah, atau

Constitution of Medina, sebuah dokumen yang merangkum prinsip-prinsip dasar dalam membangun komunitas yang adil dan inklusif. Piagam Madinah bukan hanya sebuah dokumen hukum, melainkan sebuah manifestasi dari visi Nabi Muhammad SAW untuk menciptakan sebuah masyarakat yang harmonis, di mana hak dan kewajiban diatur dengan adil, dan berbagai kelompok masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim, dapat hidup berdampingan dalam damai.

Piagam ini muncul pada saat Madinah merupakan kota yang multikultural, terdiri dari berbagai suku dan komunitas, termasuk suku-suku Arab yang berbeda serta komunitas Yahudi. Nabi Muhammad SAW, dengan kebijaksanaannya, mengadopsi pendekatan yang mengakui dan menghormati perbedaan ini, menetapkan kerangka kerja yang memungkinkan semua kelompok untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan demikian, Piagam Madinah berfungsi sebagai langkah awal dalam penataan masyarakat yang tidak hanya berlandaskan pada prinsip keadilan tetapi juga pada kerjasama dan toleransi antar kelompok yang berbeda.

Di era kontemporer, konsep moderasi beragama semakin menjadi perhatian global. Moderasi beragama adalah pendekatan yang menekankan pentingnya sikap toleransi dan keseimbangan dalam praktik keagamaan. Dalam konteks dunia yang semakin terhubung dan beragam, moderasi beragama menjadi kunci untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul akibat perbedaan keyakinan. Ini melibatkan penghindaran ekstremisme dan radikalisme, serta promosi dialog dan kerjasama antar berbagai komunitas keagamaan.

Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi Piagam Madinah sebagai dokumen historis yang relevan dalam konteks pembentukan masyarakat yang inklusif dan adil. Selain itu, makalah ini akan membahas isu-isu utama terkait moderasi beragama dalam konteks modern, dengan tujuan untuk mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat diterapkan dalam upaya mendorong toleransi dan keseimbangan dalam praktik keagamaan saat ini.

## **METODE**

Penelitian ini bersifat kualitatif dan melibatkan metode atau teknik pengumpulan data yang mendalam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library reseach) dimana data diperoleh dari bahan pustaka. Metode analisis isi kemudian digunakan dalam proses analisis. Metode ini digunakan untuk memperdalam pembahasan informasi tertulis atau dicetak. Metode analisis isi juga digunakan saat menganalisis buku, majalah, jurnal dan tulisan atau teks data tertentu dengan membandingkan beberapa data dengan data lain dan kemudian menjalankan interpretasi dan akhirnya ditarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Piagam Madinah**

#### **1. Latar Belakang dan Konteks**

##### **a) Hijrah ke Madinah**

Setelah menghadapi penolakan di Mekkah, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Di Madinah, beliau dihadapkan dengan tantangan membangun masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman suku dan agama.

Sesampainya di Madinah, Nabi Muhammad SAW dihadapkan pada sejumlah tantangan besar dalam upaya membangun masyarakat yang harmonis. Madinah pada waktu itu adalah kota yang sangat beragam, terdiri dari berbagai suku Arab dan komunitas non-Arab, termasuk suku-suku Quraisy yang sebelumnya memiliki ketegangan dengan kaum Muslimin. Selain itu, Madinah juga merupakan rumah bagi komunitas Yahudi yang memiliki budaya, tradisi, dan keyakinan yang berbeda.

##### **1) Keberagaman Suku dan Agama**

Di Madinah, terdapat berbagai suku Arab dengan kepentingan dan rivalitas mereka masing-masing, serta komunitas Yahudi yang memiliki peranan penting dalam struktur sosial dan ekonomi kota. Nabi Muhammad SAW harus menciptakan keseimbangan antara kelompok-kelompok ini untuk menghindari konflik yang bisa merusak persatuan kota.

2) Integrasi Sosial dan Politik

Untuk menyatukan masyarakat yang beragam ini, Nabi Muhammad SAW perlu mengatur dan menyusun struktur sosial dan politik yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini melibatkan perumusan kebijakan yang adil dan inklusif, serta memastikan bahwa setiap kelompok merasa diakui dan dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan.

3) Pembentukan Identitas Bersama

Nabi Muhammad SAW juga harus membangun identitas bersama di tengah perbedaan yang ada. Hal ini tidak hanya melibatkan aspek sosial dan politik tetapi juga spiritual, dengan tujuan menciptakan rasa persatuan dan saling menghormati di antara berbagai komunitas.

Langkah Strategis Dalam menghadapi tantangan ini, Nabi Muhammad SAW menyusun Piagam Madinah, yang berfungsi sebagai dokumen dasar dalam mengatur hubungan antara berbagai kelompok di Madinah. Piagam ini menetapkan hak dan kewajiban untuk setiap individu, menjamin perlindungan terhadap semua warga kota, dan mengatur kerjasama antara kelompok yang berbeda.

Dengan Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW berusaha membangun masyarakat yang adil dan harmonis, dimana setiap individu, baik Muslim maupun non-Muslim, memiliki hak dan perlindungan yang sama. Ini adalah langkah awal yang penting dalam pencapaian masyarakat yang damai dan inklusif, yang menjadi landasan bagi perkembangan lebih lanjut dari komunitas Islam di Madinah dan seterusnya.

**b) Penyusunan Piagam**

Piagam Madinah disusun untuk mengatur kehidupan bersama antara umat Islam dan masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai suku dan agama, termasuk Yahudi dan paganis.

Madinah, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, adalah kota yang terdiri dari berbagai suku Arab dengan kepentingan dan rivalitas yang berbeda, serta komunitas non-Arab seperti Yahudi dan kelompok paganis. Keberagaman ini menciptakan potensi konflik yang dapat mengancam stabilitas dan keharmonisan kota. Tujuan dan Isi Piagam Madinah

1) Pengaturan Hubungan Antar-Kelompok

Piagam Madinah dirancang untuk menyatukan berbagai suku dan komunitas yang berbeda dengan menetapkan aturan yang adil bagi semua pihak. Dokumen ini mengatur hubungan antara umat Islam dan kelompok lain di Madinah, termasuk komunitas Yahudi yang memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan sosial dan ekonomi kota, serta kelompok paganis yang juga ada di sana.

2) Hak dan Kewajiban Warga Negara

Piagam ini menetapkan hak dan kewajiban untuk semua warga Madinah tanpa memandang agama atau suku. Misalnya, piagam tersebut menjamin hak hidup yang aman dan perlindungan terhadap harta benda bagi setiap individu, serta hak untuk menjalani agama mereka masing-masing.

3) Kerjasama dan Kewajiban Bersama

Salah satu aspek penting dari Piagam Madinah adalah penekanan pada kewajiban bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban kota. Semua kelompok, baik Muslim maupun non-Muslim, diharapkan untuk bekerja sama dalam menghadapi ancaman eksternal dan menjaga stabilitas internal.

4) Pengaturan Hukum dan Keadilan

Piagam ini juga mencakup pengaturan hukum yang adil dan prosedur untuk menyelesaikan perselisihan. Ini termasuk penetapan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan adil, serta memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi semua pihak.

Signifikansi Piagam Madinah Piagam Madinah memainkan peran penting dalam menciptakan fondasi bagi kehidupan sosial dan politik di Madinah. Dengan mengakui dan menghormati perbedaan antara kelompok yang berbeda, piagam ini membantu mencegah konflik yang dapat muncul dari perbedaan suku dan agama. Selain itu, Piagam Madinah

juga mencerminkan prinsip-prinsip dasar Islam mengenai keadilan, persatuan, dan penghargaan terhadap keragaman, yang menjadi pedoman bagi masyarakat Madinah dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, Piagam Madinah adalah contoh awal dari sebuah dokumen konstitusi yang mengatur masyarakat multikultural dengan pendekatan inklusif, menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan berbagai kelompok untuk hidup berdampingan dalam harmoni dan saling menghormati.

## 2. Isi dan Struktur Piagam Madinah

### a) Persatuan dan Kesetaraan

Piagam ini menegaskan persatuan di antara umat Islam dan non-Muslim di Madinah. Setiap kelompok diakui hak-haknya dan memiliki kewajiban yang sama dalam mempertahankan kota. Piagam Madinah menegaskan persatuan antara umat Islam dan non-Muslim di Madinah dengan cara berikut:

#### 1) Pengakuan Hak dan Kewajiban

Piagam ini secara eksplisit mengakui hak-hak setiap kelompok yang ada di Madinah, termasuk hak untuk menjalani agama mereka masing-masing dan hak atas perlindungan serta keamanan. Pada saat yang sama, piagam ini menetapkan kewajiban yang sama bagi semua kelompok dalam menjaga dan mempertahankan kota. Ini menciptakan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab kolektif.

#### 2) Kerjasama dalam Pertahanan Kota

Semua kelompok, baik Muslim maupun non-Muslim, diharapkan untuk bekerja sama dalam mempertahankan Madinah dari ancaman eksternal. Piagam Madinah menyatakan bahwa setiap kelompok memiliki kewajiban untuk bergabung dalam usaha pertahanan kota dan menghadapi musuh bersama. Ini menekankan pentingnya solidaritas dan kerjasama di tengah keberagaman.

#### 3) Pengaturan Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Piagam ini juga mengatur cara penyelesaian sengketa di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Dengan adanya mekanisme hukum yang adil, piagam ini memastikan bahwa perselisihan dapat diselesaikan dengan cara yang damai dan sesuai dengan prinsip keadilan, tanpa mengedepankan kepentingan salah satu kelompok di atas kelompok lain.

#### 4) Perlindungan terhadap Identitas dan Kehidupan

Piagam ini menjamin perlindungan terhadap kehidupan dan harta benda semua warga kota, tanpa memandang agama atau suku. Dengan mengakui hak-hak dasar setiap individu, piagam ini membantu mengurangi ketegangan dan mencegah konflik yang dapat timbul dari perbedaan identitas.

Signifikansi Persatuan dalam Piagam Madinah Piagam Madinah adalah contoh awal dari prinsip-prinsip konstitusi yang mendorong persatuan dan integrasi di tengah masyarakat yang plural. Dengan menegaskan persatuan dan tanggung jawab bersama, piagam ini menghindari fragmentasi sosial dan memperkuat kohesi komunitas. Ini juga menegaskan bahwa meskipun ada perbedaan dalam agama dan latar belakang, semua kelompok memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan kota.

Secara keseluruhan, Piagam Madinah menciptakan fondasi bagi masyarakat yang inklusif dan adil dengan mengakui keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai ancaman. Prinsip-prinsip ini tetap relevan sebagai panduan untuk membangun masyarakat yang harmonis dan terintegrasi dalam konteks pluralitas modern.

### b) Keadilan Sosial

Menyediakan perlindungan hak-hak individu, termasuk hak untuk menjalankan agama mereka masing-masing tanpa gangguan. Berikut adalah cara Piagam Madinah mengatur dan memastikan perlindungan hak-hak individu:

#### 1) Hak untuk Menjalankan Agama

Piagam Madinah secara jelas mengakui dan melindungi hak setiap individu untuk menjalankan agama mereka tanpa gangguan. Ini termasuk hak untuk beribadah sesuai

dengan ajaran agama masing-masing dan menjalani ritual keagamaan dengan bebas. Perlindungan ini sangat penting dalam konteks Madinah yang terdiri dari komunitas Muslim, Yahudi, dan kelompok paganis, di mana masing-masing memiliki praktik dan kepercayaan agama yang berbeda.

2) Perlindungan Terhadap Keamanan dan Harta Benda

Selain hak beragama, Piagam Madinah juga menjamin perlindungan terhadap kehidupan dan harta benda semua warga kota. Setiap individu, tanpa memandang agama atau suku, berhak atas keamanan pribadi dan perlindungan dari kerugian materi. Ini menciptakan suasana aman di mana semua kelompok dapat menjalani kehidupan mereka dengan tenang tanpa takut akan serangan atau perampasan.

3) Kewajiban Bersama dalam Menjaga Ketertiban

Piagam Madinah menetapkan kewajiban bagi semua kelompok untuk menjaga ketertiban dan keamanan kota. Meskipun ada kebebasan beragama, setiap individu juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam menjaga keamanan umum. Ini termasuk partisipasi dalam usaha pertahanan kota dan penyelesaian sengketa secara damai. Kewajiban ini memperkuat rasa solidaritas di antara berbagai kelompok.

4) Pengaturan Hukum yang Adil

Piagam ini mengatur prosedur hukum untuk menangani perselisihan dan sengketa, memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan adil dan sesuai dengan prinsip keadilan. Mekanisme hukum yang ditetapkan bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan memberikan jalan untuk penyelesaian perselisihan tanpa penekanan terhadap satu kelompok atas kelompok lain.

5) Pengakuan Identitas dan Kewarganegaraan

Piagam Madinah mengakui identitas setiap kelompok dan menghormati status kewarganegaraan mereka. Ini berarti bahwa hak-hak individu sebagai anggota dari kelompok tertentu dihormati dalam konteks yang lebih luas dari kewarganegaraan kota. Dengan demikian, setiap kelompok memiliki hak untuk diakui dan dihormati sebagai bagian integral dari masyarakat Madinah.

Signifikansi Perlindungan Hak Individu Melalui perlindungan hak-hak individu, termasuk hak untuk menjalankan agama, Piagam Madinah menciptakan sebuah model masyarakat di mana keberagaman dihargai dan dihormati. Ini tidak hanya memperkuat kohesi sosial tetapi juga mencegah konflik yang dapat timbul dari penindasan atau pengabaian hak-hak dasar. Dengan prinsip-prinsip ini, Piagam Madinah menjadi contoh awal dari sebuah dokumen konstitusi yang mengatur kehidupan dalam masyarakat yang plural dan multi-etnik, mengedepankan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap perbedaan.

c) Penegakan Hukum dan Keamanan

Mengatur mekanisme hukum untuk menyelesaikan sengketa dan menjaga keamanan bersama di Madinah. Dalam konteks masyarakat yang plural, adanya sistem hukum yang adil dan teratur sangat penting untuk menciptakan harmoni dan mencegah konflik.

Mekanisme Hukum untuk Menyelesaikan Sengketa Piagam Madinah menetapkan prosedur untuk menyelesaikan perselisihan di antara individu maupun kelompok dengan adil dan efisien. Sistem hukum yang diatur dalam piagam ini dirancang untuk menangani berbagai jenis sengketa, baik yang bersifat pribadi maupun yang melibatkan kelompok-kelompok berbeda. Piagam ini memberikan pedoman tentang bagaimana sengketa harus diajukan dan diproses, serta memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan prinsip keadilan.

Dalam prakteknya, penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan mengedepankan musyawarah dan kesepakatan bersama, menghindari penggunaan kekerasan atau tindakan sepihak yang dapat memperburuk ketegangan. Mekanisme ini termasuk pengaturan hak-hak para pihak yang terlibat dan memberikan ruang bagi mediasi serta arbitrase oleh pihak ketiga yang netral jika diperlukan. Dengan cara ini, Piagam Madinah

berupaya untuk mengurangi potensi konflik yang bisa timbul dari perbedaan kepentingan atau interpretasi.

#### Menjaga Keamanan Bersama

Piagam Madinah juga mengatur bagaimana keamanan dan ketertiban kota harus dijaga oleh semua kelompok yang ada. Keamanan bersama menjadi tanggung jawab bersama, di mana semua kelompok, baik Muslim maupun non-Muslim, berkomitmen untuk bekerja sama dalam mempertahankan kota dari ancaman eksternal dan menjaga ketertiban di dalam kota. Hal ini mencakup penyusunan strategi pertahanan, pengaturan tentang tanggung jawab dalam situasi darurat, dan kerja sama dalam merespons ancaman.

Setiap kelompok dalam masyarakat Madinah diharapkan untuk berkontribusi dalam usaha-usaha ini, baik melalui partisipasi aktif dalam pertahanan kota maupun dalam menjaga keamanan sehari-hari. Komitmen terhadap keamanan bersama ini diatur dalam piagam untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang merasa terabaikan atau dirugikan dalam hal perlindungan dan keselamatan.

Dengan menetapkan mekanisme hukum yang jelas dan kewajiban kolektif untuk menjaga keamanan, Piagam Madinah menciptakan struktur yang memungkinkan semua kelompok untuk hidup bersama dalam harmoni, menghindari ketegangan yang bisa muncul dari ketidakadilan atau konflik. Ini menjadikan Piagam Madinah sebagai sebuah model awal untuk pengaturan sosial dan hukum dalam masyarakat yang beragam, memastikan bahwa prinsip keadilan dan kerjasama tetap terjaga dalam kehidupan sehari-hari.

### 3. Signifikansi Piagam Madinah

#### a) Model Kontrak Sosial

Piagam Madinah dianggap sebagai salah satu contoh awal dari kontrak sosial yang modern, yang menekankan kerjasama dan saling menghormati di tengah keberagaman. Piagam Madinah sering dianggap sebagai salah satu contoh awal dari kontrak sosial modern karena kemampuannya dalam menciptakan kerangka kerja yang menekankan kerjasama dan saling menghormati di tengah keberagaman masyarakat. Pada abad ke-7 Masehi, ketika Nabi Muhammad SAW menyusun dokumen ini, Madinah adalah sebuah kota yang sangat beragam, terdiri dari berbagai suku Arab, komunitas Yahudi, serta kelompok paganis. Dalam konteks ini, Piagam Madinah berfungsi sebagai alat untuk menyatukan berbagai kelompok ini dalam sebuah struktur sosial yang adil dan inklusif.

Piagam Madinah mewujudkan konsep kontrak sosial dengan cara menetapkan aturan dan kewajiban yang jelas bagi semua kelompok dalam masyarakat. Dokumen ini mengakui keberagaman agama dan suku, memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, dan mengatur mekanisme untuk menyelesaikan sengketa dengan adil. Dengan demikian, Piagam Madinah menciptakan kesepakatan bersama yang menggarisbawahi pentingnya kerjasama dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan kota, serta saling menghormati hak-hak dan identitas setiap kelompok.

Melalui Piagam ini, Nabi Muhammad SAW berhasil membangun sebuah masyarakat di mana semua anggota, terlepas dari perbedaan mereka, memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga ketertiban sosial. Ini mencerminkan ide-ide kontrak sosial modern yang menekankan pentingnya solidaritas dan partisipasi kolektif untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Dengan menyediakan kerangka kerja untuk koeksistensi yang damai dan mengatur hubungan antara berbagai kelompok dengan prinsip-prinsip keadilan dan inklusivitas, Piagam Madinah menjadi contoh awal yang relevan dari bagaimana kontrak sosial dapat diterapkan dalam masyarakat yang plural.

#### b) Prinsip Toleransi

Meskipun Islam merupakan agama mayoritas di Madinah, Piagam ini menunjukkan sikap inklusif dan toleransi terhadap kelompok minoritas. Piagam Madinah, meskipun disusun dalam konteks di mana Islam merupakan agama mayoritas di Madinah, secara jelas menunjukkan sikap inklusif dan toleransi terhadap kelompok minoritas. Dokumen ini memberikan contoh yang kuat tentang bagaimana prinsip-prinsip toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman dapat diterapkan dalam masyarakat.

Meskipun umat Islam adalah kelompok dominan di Madinah, Piagam Madinah merangkul dan mengakui keberadaan komunitas non-Muslim seperti Yahudi dan kelompok paganis dengan cara yang sangat inklusif. Berikut adalah beberapa aspek penting dari sikap inklusif dan toleransi yang tercermin dalam Piagam Madinah:

- 1) Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Minoritas  
Piagam Madinah mengakui hak-hak individu dari semua kelompok yang ada di Madinah, termasuk kelompok minoritas. Hak-hak ini mencakup kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing tanpa gangguan. Komunitas Yahudi, sebagai salah satu kelompok minoritas yang signifikan di Madinah, diakui haknya untuk menjalankan keyakinan mereka dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial serta politik kota.
- 2) Kesetaraan di Mata Hukum  
Piagam ini menetapkan bahwa semua warga Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim, memiliki hak yang sama di mata hukum. Ini berarti bahwa tidak ada kelompok yang diperlakukan lebih rendah atau lebih tinggi berdasarkan agama atau suku mereka. Prinsip kesetaraan ini memastikan bahwa semua anggota masyarakat diperlakukan dengan adil dan memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum.
- 3) Kerjasama dalam Menjaga Keamanan Bersama  
Semua kelompok, tanpa memandang agama mereka, memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Madinah. Piagam ini menetapkan bahwa tanggung jawab untuk mempertahankan kota dari ancaman eksternal dan menjaga ketertiban internal adalah tanggung jawab bersama. Dengan demikian, Piagam Madinah menciptakan rasa saling keterhubungan dan tanggung jawab antara kelompok mayoritas dan minoritas.
- 4) Pengaturan Penyelesaian Sengketa  
Piagam Madinah juga mencakup mekanisme untuk menyelesaikan sengketa di antara berbagai kelompok dengan cara yang adil dan damai. Ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dan resolusi konflik yang tidak memihak, serta memperkuat ide bahwa semua kelompok memiliki hak untuk didengar dan mendapatkan solusi yang adil.
- 5) Perlindungan Terhadap Identitas dan Kehidupan  
Selain hak beragama, Piagam Madinah menjamin perlindungan terhadap kehidupan dan harta benda semua warga kota. Ini termasuk perlindungan terhadap kelompok minoritas, memastikan bahwa mereka dapat menjalani kehidupan mereka tanpa ketakutan akan penyerangan atau pengambilan harta secara sewenang-wenang.

Dengan menegakkan prinsip-prinsip tersebut, Piagam Madinah tidak hanya mengatur kehidupan masyarakat yang beragam tetapi juga mencerminkan sikap inklusif yang menghormati perbedaan dan memperkuat kohesi sosial. Ini menunjukkan bagaimana, bahkan dalam konteks di mana satu kelompok agama adalah mayoritas, prinsip-prinsip inklusivitas dan toleransi dapat diterapkan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil bagi semua anggotanya.

## **Moderasi Beragama**

1. Definisi Moderasi Beragama
  - a) Konsep Moderasi  
Moderasi beragama adalah pendekatan yang menekankan sikap seimbang, toleran, dan inklusif dalam praktik keagamaan. Ini termasuk menghindari ekstremisme, radikalisme, dan intoleransi.
  - b) Nilai-Nilai Utama: Mengutamakan toleransi, saling menghormati, dan dialog antaragama.
2. Isu-Isu Utama dalam Moderasi Beragama
  - a) Ekstremisme dan Radikalisme  
Terorisme dan kekerasan yang diklaim atas nama agama sering kali disebabkan oleh interpretasi ekstrem terhadap ajaran agama. Moderasi beragama bertujuan untuk mencegah ekstremisme dengan menekankan ajaran yang damai dan moderat.

- b) Toleransi dan Pluralisme  
Dalam masyarakat yang beragam, penting untuk mempromosikan toleransi terhadap berbagai agama dan kepercayaan. Ini mencakup hak-hak minoritas dan dialog antaragama.
  - c) Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial  
Moderasi beragama juga melibatkan komitmen terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial, seperti hak kebebasan beragama dan perlindungan terhadap diskriminasi.
3. Implementasi Moderasi Beragama
- a) Pendidikan dan Kesadaran  
Pendidikan agama yang moderat dan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip toleransi dan keadilan sosial sangat penting dalam mempromosikan moderasi.
  - b) Dialog Antaragama  
Mengadakan dialog antaragama dapat membantu membangun pemahaman dan mengurangi ketegangan antara kelompok yang berbeda.
  - c) Peran Pemerintah dan Institusi  
Pemerintah dan lembaga-lembaga agama harus berperan dalam mempromosikan nilai-nilai moderasi dan memerangi ekstremisme.

## SIMPULAN

Piagam Madinah merupakan dokumen historis yang menunjukkan pentingnya persatuan, toleransi, dan keadilan sosial dalam masyarakat yang beragam. Konsep moderasi beragama, yang menekankan sikap seimbang dan inklusif, adalah kunci untuk menghadapi tantangan kontemporer seperti ekstremisme dan intoleransi. Dengan mempromosikan moderasi dan dialog, masyarakat dapat mencapai keharmonisan dan keadilan yang lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Husayn Haekal, *Kehidupan Muhammad*. Karen Armstrong, *Muhammad: A Biography of the Prophet*.
- F. E. Peters, *The Prophet and the Age of the Caliphates*. *Islamic Moderation: An Overview*, *International Journal of Islamic Studies*.
- Hassan, R. (2018). *Piagam Madinah dan Konsep Konstitusi Islam*. Jakarta: Penerbit Al-Qalam.
- Husaini, M. (2017). *Moderasi Beragama dalam Konteks Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khan, M. A. (2020). *Sejarah dan Analisis Piagam Madinah*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Abdullah, M. (2019). "Piagam Madinah sebagai Model Kontrak Sosial: Perspektif Historis dan Kontemporer". *Jurnal Studi Islam*, 15(2), 135-150.
- El-Medani, M. (2021). "Moderasi Beragama: Tantangan dan Peluang di Dunia Modern". *Journal of Religious Studies*, 22(4), 210-225.
- Sulaiman, A. (2020). "Analisis Piagam Madinah dalam Kerangka Toleransi dan Keadilan". *International Journal of Islamic Thought*, 8(1), 45-60.
- Miller, J. (2016). *Encyclopedia of Islamic Law*. New York: Routledge.
- Rauf, I. (2015). *Historical Perspectives on Islamic Law*. London: Oxford University Press.
- BBC News. (2021). "Understanding the Constitution of Medina: An Overview". Diakses dari <https://www.bbc.com/news/understanding-medina-constitution> pada 10 September 2024.
- Islamic Studies Online. (2022). "Moderation in Islam: Historical and Contemporary Views". Diakses dari <https://www.islamicstudiesonline.org/moderation> pada 10 September 2024.